

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang didalamnya menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatifnya pada UU No 32 Tahun 2004 maka unsur otonomi daerah adalah: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, dalam hal ini yang akan dibahas adalah kewajiban daerah otonom. Pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten pada UU No 32 Tahun 2004 Pasal 14 yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana umum. Penanganan bidang kesehatan.

Penyelenggaraan pendidikan dan lainnya yang menjadi urusan Pemerintah yang telah di amanatkan dalam perundang-undangan.

Upaya mengurangi kesenjangan pembangunan dan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja Pemerintah telah menggulirkan Program-Program Pembangunan yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No:25/Kep/Menko/Kesra/Vii/2007 Tentang Pedoman Umum program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang merupakan salah satu dari kewenangan wajib yang menjadi urusan daerah otonom menuju daerah yang lebih baik lagi, Pemerintah Daerah gencar berbagai cara dan berkreasi membentuk tata ruang dan tata kota yang lebih baik dan memadai untuk masyarakat di sekitarnya agar tujuan dari Pemerintah bisa tercapai salah satunya yaitu mensejahterakan masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat pemerintah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan dalam hal ini selain dari segi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya juga ada pembangunan daerah, hal ini dilakukan untuk membuat daerah tata ruangnya menjadi lebih baik lagi dan tertata rapi dan menjadi suatu pencitraan daerah tersebut bagi daerah otonom lainnya.

Sejalan dengan program Pemerintah Pusat tersebut, maka Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menggulirkan program Pembangunan Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK). Program GSMK di tetapkan lewat Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK). Program Gerakan Serentak Membangun Kampung yang di sebut GSMK adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan insfrastruktur kampung di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Maksud dari program Gerakan Serentak Membangun Kampung adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten untuk mendorong adanya program pembangunan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Tulang Bawang, dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat Kampung/Kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat di butuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung/Kelurahan dalam pembangunan daerah, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan, meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, meningkatkan semangat gotong royong, dan kebersamaan dalam proses pembangunan. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Kampung, dan menimbulkan rasa memiliki masyarakat

terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.(Perbup Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2013).

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip dari program Gerakan Serentak Membangun Kampung yaitu Inisiatif, Partisipatif, Demokratis, Manfaat, Gotong Royong, dan Berkelanjutan. Sasaran dari program ini adalah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang dan jenis kegiatan yang diprioritaskan adalah pembangunan jalan *onderlagh*, jembatan, irigasi tersier, dan lain-lain apabila mendapat persetujuan Bupati Tulang Bawang.

Kebijakan program ini untuk mendorong adanya gerakan pembangunan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada dan pranata sosial seperti *Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nengah Nyappur, Gotong Royong, Persaudaraan, dan Kebersamaan*, dan nilai-nilai sosial khas Kabupaten Tulang Bawang. Adapun nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang khas penduduk masyarakat Tulang Bawang ada 5 (lima) prinsip yaitu: *Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Bejuluk Beadek*.

Program ini dijalankan serentak disemua Kampung yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, alasan ini karena supaya tidak adanya diskriminasi antar masyarakat, dan Pemerintah pun merangkul seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam program ini dengan pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotongroyongan, dalam proses

perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan diharapkan akan dapat mewujudkan Kampung yang mandiri. Kampung yang mandiri dalam hal ini yang dimaksud adalah Kampung yang warganya mempunyai semangat membangun yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan kampungnya, serta melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumber daya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan.

Karakteristik dari masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang beragam sesuai dengan suku, yang kebanyakan dari suku Lampung sedikit susah diatur berbeda dengan suku lainnya seperti Bali, Jawa, Sunda, yang mudah diatur dan kreatif. Begitu juga dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) yang di buat oleh pemerintah masyarakat di desa yang jauh dari jangkauan Pemerintah Daerah ketika mendengar adanya program ini sangat gembira karena mereka merasa diperhatikan oleh Pemerintah.

Berbeda dengan masyarakat yang dekat dengan jangkauan Pemerintah Daerah menyambut dengan biasa saja karena dekat dengan Ibukota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Kecamatan Menggala. Masyarakat yang kebanyakan adalah suku Lampung tidak terlalu gembira walaupun begitu program yang diadakan Pemerintah tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Tetap mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan tidak melanggar peraturan.

Implementasi program pembangunan GSMK ini yakni salah satunya pembangunan jalan *onderlagh* dan lingkungan yang menjadi perhatian pembangunan adalah lingkungan Desa Bujung Tenuk melalui wawancara peneliti terhadap Kepala Lingkungan Bujung Tenuk mengenai Tingkat partisipasi masyarakat, sebagai data awal melalui wawancara terhadap kepala lingkungan dan masyarakat. Desa Bujung Tenuk pada tahapan sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan pada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan *onderlagh* pada program pembangunan Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K), di lingkungan Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ini, masih sangat minim. Minimnya partisipasi masyarakat diindikasikan dengan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan pembangunan jalan *onderlagh* yakni salah satu program dari GSMK/K.

Kepala Lingkungan Bujung Tenuk menyampaikan bahwasanya masyarakat dan perangkat lingkungan seperti kepala lingkungan dan perangkat lainnya kurang dilibatkan dalam proses sosialisasi maupun pembangunan jalan tersebut. Selain itu mayoritas masyarakat dari desa bujung tenuk merupakan masyarakat yang bersuku lampung dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya masyarakat suku lampung masih sedikit susah diatur dan acuh tak acuh mengenai program GSMK/K (Hasil wawancara terhadap Ansori Idrus Adam sebagai kepala Kampung Bujung Tenuk 18 Januari 2015).

Berbeda dengan hasil wawancara kepada kepala desa Mekar Indah Jaya yakni dudung yang menyatakan bahwa masyarakat di desa ini sangat antusias dalam menyambut program GSMK/K yang hadir membantu kemajuan dari desa tersebut, bahkan masyarakat yang tergolong mampu dalam hal materi di desa tersebut ikut membantu dana sehingga pelaksanaan dari program GSMK/K berjalan secara maksimal.

Uraian mengenai kondisi partisipasi masyarakat, berdasarkan apa yang telah disampaikan kepala lingkungan Bujung Tenuk menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat minim dalam pelaksanaan pembangunan jalan *onderlagh* di lingkungan Bujung Tenuk ini. Implementasi kebijakan yang dalam hal ini adalah program pembangunan Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) pada dasarnya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan dalam pembangunan infrastruktur, yang seharusnya juga dengan dilaksanakannya program pembangunan Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) tersebut maka hak masyarakat akan ikut serta berpartisipasi atau dilibatkan di dalamnya.

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) merupakan sebuah kebijakan yang telah digulirkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang guna meningkatkan partisipasi masyarakat Tulang Bawang dalam program GSMK/K tersebut. Program ini diharapkan dapat memberikan

implikasi yang signifikan terhadap kemajuan pembangua Kabupaten Tulang Bawang.

Apabila tingkat keterlibatan masyarakat cukup baik, maka akan mampu meningkatkan swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan hasil pembangunan, meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang berujung pada rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Sehingga Kabupaten Tulang Bawang yang lebih bermartabat, aman, beragam, unggul dan berdaya saing akan dapat segera terwujud.

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung dapat membantu pemerataan pembangunan dan besar harapan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kampung di Tulang Bawang. Karena program ini menitikberatkan kepada fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Sehingga dengan begitu, kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan akan semakin besar, yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan yang kolektif, komunikatif dan efektif diseluruh wilayah Tulang Bawang. Sesuai dengan semboyan Bupati untuk Kabupaten Tulang Bawang, yaitu “Menuju Masyarakat dan Daerah yang Lebih Bermartabat, Aman, Beragam dan Berdaya Saing”.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat semakin diperlukan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan diwilayahnya semakin meningkat, namun di sisi lain adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menginginkan dengan adanya program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) masyarakat bisa bekerja sama walaupun karakteristik masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang yang beragam bisa saling membantu, gotong royong dan lainnya. Program swadaya ini diberikan kepada masing-masing kampung agar masyarakat bisa kumpul bersama dan musyawarah apa yang sebenarnya diinginkan oleh semua masyarakat untuk membangun dan membuat kampung mereka menjadi lebih baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang juga berharap dengan adanya program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) melalui swadaya, bisa menjaga kampungnya dan tidak merusak begitu saja. Memelihara dengan baik karena mereka yang mengerjakan program. Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) merupakan program pembangunan daerah yang dibuat oleh Pemerintah daerah.

Program yang mengedepankan pembangunan dan yang diutamakan ada di Kampung/Kelurahan selama 5 tahun dan dilaksanakan bertahap setiap tahunnya. Sekarang dalam pengerjaan tahap ke-2 (Dua) ini telah

memperlihatkan hasil yang baik untuk tata pembangunan daerah. Daerah Tulang Bawang khususnya untuk Kampung-kampung lebih enak dilihat, dan lebih mudah dijangkau. Namun demikian, karena terlalu singkatnya waktu perencanaan yang ada pada tingkat kampung. Juga kurangnya pengetahuan tentang GSMK/K, sehingga rebug kampung yang dilaksanakan masih perlu dioptimalkan agar tepat pada sasaran kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program GSMK/K, sehingga peneliti menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai implementasi kebijakan program gerakan serentak membangun kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana proses implementasi program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bagaimana karakteristik masyarakat penerima program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang.

3. Bagaimana hasil dari kebijakan Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk membahas Proses implementasi dari kebijakan program program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat yang ada pada Kebijakan program program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Untuk mengetahui hasil dari kebijakan Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis untuk hasil penelitian merekomendasikan bahwa dalam implementasi kebijakan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang bisa digunakan untuk melihat hasil dari implementasi program dan masalah yang terjadi pada saat implementasi program.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diberikan dalam penelitian ini adalah menambah keilmuan dan informasi serta menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan konsep dan teori kajian kebijakan publik dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan publik.